



Kasus dan Mobilitas Masih Tinggi

JOGJA-Kasus penambahan Covid-19 dan tingkat mobilitas warga di DIY masih tinggi meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah memasuki hari ke-10.

Ujang Hasanudin, Abdul Hamid Razak,
& Yusuf Leon
redaksi@harianjogja.com

Berdasarkan laporan Pemda DIY, menekan mobilitas warga minimal 30% belum bisa dilaksanakan.

Selain itu, penambahan kasus Covid-19 di DIY per Senin (12/7) juga masih tinggi yakni 1.731 kasus. Kini total kasus terkonfirmasi di Bumi Mataram menjadi 77.994 kasus.

Penambahan kasus positif tersebut terbanyak dari Bantul (677 kasus), disusul Jogja (348), Sleman (340), Gunungkidul (243), dan Kulonprogo (123). Penambahan kasus positif ini berdasarkan pemeriksaan sampel harian 6.861 sampel dari orang yang diperiksa sebanyak 6.816 orang. Dengan tambahan sampel itu, saat ini total sampel yang diperiksa sejak pandemi melanda DIY Maret 2020 lalu sebanyak 414.437 dan total jumlah orang yang diperiksa sebanyak 387.833.

Kepala Bagian Humas, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol (UHP) Setda DIY,

► Berdasarkan rilis dari Pemerintah Pusat yang memantau melalui *google traffic* mobilitas warga di DIY hanya turun 15%-16%.

► Di Sleman antrean kendaraan turun sampai 33%, Kulonprogo 28%, Bantul 35%, Jogja 33%.

Ditya Nanaryo Aji, mengatakan berdasarkan riwayat penambahan kasus positif terbanyak dari hasil *tracing* kontak kasus positif sebanyak 1.496 kasus.

"Berdasarkan periksa mandiri 217 kasus, berdasarkan skrining karyawan kesehatan tiga kasus, dan belum ada info atau belum diketahui riwayatnya sebanyak 15 kasus," kata Ditya.

Pada hari yang sama juga terjadi penambahan angka meninggal dunia sebanyak 47 kasus, sehingga total kasus meninggal menjadi 2.026 kasus. Penambahan kasus meninggal dunia karena Covid-19 terbanyak dari Sleman dan Bantul masing-masing 17 kasus, kemudian Gunungkidul tujuh, dan Jogja enam kasus.

Penambahan kasus sembuh sebanyak 782 kasus, sehingga total sembuh menjadi 56.430 kasus. Penambahan kasus sembuh dari Jogja 190 kasus, Bantul 131 kasus, Kulonprogo 47 kasus, Gunungkidul 112 kasus, dan Sleman 302 kasus.

► Halaman 10



Kasus dan...

Kepala Dinkes Sleman, Joko Hastaryo, mengakui sampai saat ini belum ada tanda-tanda kasus penularan Covid-19 di Sleman turun. "Iya belum ada tanda-tanda melandai, malah naik terus karena *tracing*-nya gencar sehingga *testing*-nya tinggi," kata Joko.

Ia berharap setelah 14 hari penerapan PPKM Darurat pada 20 Juli nanti, diharapkan penularan Covid-19 dapat menurun. Sayangnya, kata Joko, dengan melihat data-data penularan dalam sepekan terakhir kondisi di Sleman masih belum melihat adanya tanda-tanda penurunan kasus.

Mobilitas Warga

Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan berdasarkan rilis dari Pemerintah Pusat yang memantau melalui *google traffic* mobilitas warga di DIY hanya turun 15%-16%. Sementara Gubernur DIY Sri Sultan HB X menargetkan mobilitas warga selama PPKM Darurat minimal bisa turun sampai di angka 30%.

Karena itu Dishub bersama unsur terkait seperti kepolisian, TNI, Satpol PP terus berupaya untuk menekan mobilitas dengan penyekatan. Penyekatan ada yang dilakukan selama pukul 20.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Namun ada juga yang diberlakukan selama 24 jam di beberapa ruas jalan.

Menurut dia panjang antrean berdasarkan pemantauan di sejumlah simpang ruas jalan cukup efektif dengan adanya PPKM Darurat dan penyekatan di sejumlah ruas jalan. Misalnya di Sleman antrean kendaraan turun sampai 33%, Kulonprogo 28%, Bantul 35%, Jogja 33%. "Berdasarkan pantauan melalui CCTV di simpang simpang tertentu ambil data dan olah memang cukup efektif apa yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten dan kota serta kepolisian. Panjang antrean berkurang terkait dengan adanya penyekatan. Kecuali di Gunungkidul memang belum ada CCTV-nya dan baru tahun ini kami akan pasang CCTV di beberapa simpang jalan," tandas Ni Made.

Ni Made meminta masyarakat untuk sama-sama memahami bahwa adanya PPKM Darurat tujuannya adalah mengurangi kerumunan karena kerumunan salah satu potensi penularan Covid-19. Namun jika masih ada tempat usaha nonesensial buka, upaya yang dilakukan pemerintah

menjadi percuma. Karena itu dibutuhkan kesadaran masyarakat semua untuk sama-sama menekan penularan Covid-19.

Adapun, berdasarkan data Satpol PP DIY sampai hari kesembilan PPKM Darurat atau sampai Minggu (11/7), sebanyak 630 tempat usaha ditutup, 419 tempat usaha dibubarkan karena terjadi kerumunan dan menyediakan makan di tempat, serta 32 tempat usaha disegel karena sudah diperingatkan tetapi kembali lagi mengulangi pelanggaran. Tempat usaha tersebut di antaranya sektor nonesensial dan toko kelontong, warung makan, dan restoran, tempat hiburan, supermarket, dan tempat olahraga.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengatakan data tersebut merupakan hasil *monitoring* Satgas Penanganan Covid-19 DIY, belum termasuk pelanggaran hasil *monitoring* Satgas Penanganan Covid-19 gabungan dari DIY dan Satgas di kabupaten dan kota. Noviar mengaku instansinya akan terus memonitor selama PPKM Darurat agar bisa menekan mobilitas warga.

Sebab mobilitas warga di DIY sampai hari kesembilan PPKM Darurat masih cukup tinggi.

Penurunan Mobilitas

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan, penyekatan di sejumlah ruas jalan di Kota Jogja baru mampu menurunkan volume kendaraan sebesar 30%. Angka itu masih jauh dari harapan. Untuk itu Pemkot akan memastikan apakah perusahaan mematuhi aturan PPKM Darurat atau tidak.

"Itu yang menjadi fokus kami. Apakah yang non esensial maupun non kritikal ini WFH 100 persen," katanya.

Heroe menambahkan jumlah warga yang berkerumun di tempat-tempat yang selama ini dijadikan kawasan nongkrong sejauh ini sudah menurun. Hanya saja pihaknya mengakui bahwa mobilitas masyarakat masih belum terkendali.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan berdasarkan hasil laporan seluruh panewu, secara umum penerapan PPKM Darurat di Sleman berjalan dengan baik. Namun demikian, masih ditemui sejumlah pedagang yang melanggar kebijakan PPKM Darurat.

"Dari laporan hasil operasi penegakkan pada masa PPKM Darurat mulai dari tanggal 3 sampai dengan 9 Juli 2021,

terdapat 186 pelanggaran," kata Kustini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman, Arip Pramana, mengatakan penyekatan jalan baru menekan laju mobilitas warga hingga 32,2%. "Kalau berdasarkan penilaian *google traffic* Sleman menurun sekitar 32,2 persen sedangkan berdasarkan *facebook mobility* terjadi penurunan 22,6 persen," katanya.

Untuk terus menekan laju mobilitas warga, pada pekan kedua PPKM Darurat selain mengintensifkan penyekatan di sejumlah jalan Dishub juga akan menambah durasi waktu penutupan jalan pada titik tertentu. "Targetnya terjadi penurunan mobilitas masyarakat antara 30 persen hingga 50 persen," kata Arip.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul, Yulius Sulharta, mengatakan sejak diberlakukan PPKM Darurat tercatat ada 120 pelanggaran. "Untuk warung makan atau kafe memang paling mendominasi. Hingga kemarin ada 69 pelanggaran, dan ada dua warung makan dan kafe yang harus kami tutup dan lakukan penyegekan," kata Yulius.

Menurut Yulius, penyekatan di sejumlah wilayah kota di Bantul membuat pelaku usaha di sekitarnya tertib dan menyesuaikan diri dengan aturan PPKM Darurat. Namun, di lokasi Jalan Parangtritis, Imogiri Barat, dan Banguntapan, pelanggaran masih kerap ditemukan.

Obat-obatan

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanita Baskara Aji mengatakan segera menyalurkan paket obat-obatan khusus untuk pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (Isoman). Penyaluran obat ini karena banyaknya pasien Covid-19 yang menjalani isoman meninggal dunia.

"Yang isoman cukup banyak karena persediaan selter dan RS terbatas, maka yang rumahnya memenuhi persyaratan diperbolehkan isoman bagi yang bergejala ringan dan tanpa gejala," kata Baskara Aji.

Namun Baskara Aji tidak menyebut berapa total pasien isoman yang meninggal dunia. Baskara Aji mengatakan obat-obatan rencananya dikirimkan oleh Pemerintah Pusat dalam waktu dekat. Sementara penyalurannya di daerah akan dilakukan oleh puskesmas dibantu dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat. (Jumail)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. BPBD			
4. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005